



## Pendekatan Filosofis dalam Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Berbasis Pembukaan UUD 1945 di Abad Ke-21

Doni Ferdio I. D.<sup>1\*</sup>, Devin Findi<sup>2</sup>, Ihsan Setiaji Bagus Utomo<sup>3</sup>, M. Hanif Amirudin<sup>4</sup>, Renaldi Abdillah<sup>5</sup>, Hidayat Nur Fikri<sup>6</sup>, Ellyas Sugiharto<sup>7</sup>, Andi Susanto<sup>8</sup>, M. Faiquddin Putra<sup>9</sup>, Suyono<sup>10</sup>

<sup>1-10</sup> Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

[suyono@unipasby.ac.id](mailto:suyono@unipasby.ac.id)<sup>10\*</sup>

Alamat: Jl. Dukuh Menanggal XII, Surabaya, Jawa Timur 60234

Korespondensi penulis: [suyono@unipasby.ac.id](mailto:suyono@unipasby.ac.id)

**Abstract.** *Technological developments and globalization have had a significant impact on civic education, so education policies need to be updated to be in line with the needs of modern society. This research aims to examine in depth the concepts, meanings, strategies, and insights of civic education in higher education through a philosophical approach to the Preamble to the 1945 Constitution in the context of the 21st century. The research was conducted using a descriptive method that utilizes observation, documentation, and literature studies that are comprehensively analyzed. The results of the study show that civic education based on a philosophical study of the Preamble to the 1945 Constitution can increase students' understanding of civic values in the context of contemporary Indonesia. This education is also a means of strengthening students' understanding of Pancasila and the 1945 Constitution as the basis of the state, with an emphasis on democracy, human rights, diversity, and national unity. In addition, this approach also underscores the importance of real practices, such as student participation in social and political activities, and the development of communication and leadership skills.*

**Keywords:** *Civic Education, Philosophical Approach, College, Students*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi dan globalisasi memberikan dampak signifikan terhadap pendidikan kewarganegaraan, sehingga kebijakan pendidikan perlu diperbarui agar selaras dengan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, makna, strategi, serta wawasan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi melalui pendekatan filosofis terhadap Pembukaan UUD 1945 dalam konteks abad ke-21. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif yang memanfaatkan observasi, dokumentasi, dan studi literatur yang dianalisis secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis kajian filosofis terhadap Pembukaan UUD 1945 mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks Indonesia kontemporer. Pendidikan ini juga menjadi sarana memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, dengan penekanan pada demokrasi, hak asasi manusia, keberagaman, dan persatuan bangsa. Selain itu, pendekatan ini juga menggarisbawahi pentingnya praktik nyata, seperti partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosial, politik, dan pengembangan keterampilan komunikasi serta kepemimpinan.

**Kata Kunci:** Pendidikan Kewarganegaraan, Pendekatan Filosofis, Perguruan Tinggi, Mahasiswa

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang memegang peran penting dalam membangun karakter dan sikap warga negara yang bertanggung jawab (Prasetyo dkk., 2023). Melalui PKn, maka individu diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, yang menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan demokratis. Namun, kenyataannya, banyak perguruan tinggi di Indonesia belum memberikan perhatian yang memadai terhadap integrasi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka. Hal ini yang menimbulkan kekhawatiran karena pendidikan kewarganegaraan yang tidak terkelola

dengan baik dapat menghambat pembentukan karakter-karakter bangsa yang baik dan berkualitas (Rudy Widyatama dkk., 2024).

Salah satu dari tantangan utama dalam implementasi PKn adalah ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang kurang adaptif terhadap perkembangan zaman membuat pendidikan kewarganegaraan yang masih kurang relevan dengan tantangan global maupun kebutuhan lokal. Selain itu, kemajuan teknologi dan globalisasi yang semakin memperumit dinamika ini, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan yang inovatif dan strategis dalam rangka untuk penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. Tantangan lainnya yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi tenaga pengajar maupun staf administrasi, yang sering kali memengaruhi efektivitas dari proses penyelenggaraan PKn (Setiasih dkk., 2024). Akses pendidikan yang terbatas bagi sebagian masyarakat juga menjadi hambatan serius.

Menyadari pentingnya peran PKn, perguruan tinggi perlu menjadikannya sebagai bagian integral dari kurikulum untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi di era modern (Zufar dkk., 2023). Kajian mendalam dan strategi implementasi yang efektif sangat diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan ini. Dengan pendekatan yang tepat, maka pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dapat memperkuat sistem demokrasi negara dan mendorong persatuan bangsa Indonesia, tetapi juga untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab di abad ke-21 (Samidi dkk., 2020).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki landasan teoritis yang kuat, yang berasal dari berbagai konsep dan pendekatan pendidikan. Beberapa teori utama yang menjadi dasar kajian ini meliputi:

### **Teori Pendidikan Kewarganegaraan**

Teori ini yang menekankan pentingnya membentuk warga negara yang memahami dan menghargai nilai-nilai dasar negara. Pendidikan kewarganegaraan yang mana bertujuan membangun karakter warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan juga mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat (Azzahra dkk., 2024).

### **Teori Demokrasi**

Teori ini yang menggarisbawahi peran pendidikan dalam memperkuat partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan yang mana bertujuan untuk

menanamkan nilai-nilai dari demokrasi, termasuk penghormatan terhadap perbedaan pendapat dan keberagaman (Khatimah dkk., 2024).

### **Teori Kritis**

Teori ini yang mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kritis dalam menganalisis masyarakat, pemerintahan, dan kebijakan. Pendekatan ini yang membantu mahasiswa memahami struktur sosial dan struktur ekonomi yang dapat memengaruhi kehidupan mereka (Wulandari dkk., 2022).

### **Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945**

Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi landasan utama dalam pendidikan kewarganegaraan, dengan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Kajian filosofis ini membantu mahasiswa memahami historis dan ideologis Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila (Pahlevi, 2016).

### **Keterampilan Abad ke-21**

Keterampilan berpikir kritis, komunikasi efektif, kolaborasi, dan juga literasi teknologi menjadi aspek penting dalam pendidikan kewarganegaraan modern. Mahasiswa perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global, baik dalam konteks lokal maupun internasional (Redhana, 2019).

Kajian ini mengintegrasikan teori dan konsep di atas untuk merancang strategi pendidikan kewarganegaraan yang relevan, inovatif, dan aplikatif bagi mahasiswa perguruan tinggi di era globalisasi.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan data berupa ucapan, tulisan, dan juga perilaku individu, kelompok, atau organisasi yang diamati dalam konteks tertentu (Widyatama dkk., 2024). Pendekatan ini yang memungkinkan pemahaman yang holistik dan lebih mendalam terhadap suatu fenomena/peristiwa. Untuk mendukung penelitian ini, beberapa metode diterapkan, termasuk analisis dokumen, studi literatur, observasi, dan studi kasus. Analisis dokumen ini yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, kebijakan pemerintah, dan dokumen lain relevan dengan pendidikan kewarganegaraan. Studi literatur ini yang digunakan untuk memperoleh informasi dari pakar atau sumber terpercaya, seperti buku tokoh masyarakat, regulasi pemerintah, serta pengalaman mahasiswa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik pengajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi untuk mengevaluasi efektivitasnya.

Sementara itu, untuk studi kasus difokuskan pada analisis mendalam terhadap praktik pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi tertentu, dengan menggunakan kasus spesifik sebagai bahan penelitian. Pendekatan ini yang memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi berbagai aspek-aspek pendidikan kewarganegaraan secara komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi melalui kajian filosofis yang bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan memfokuskan pengetahuan tentang konstitusi dan sistem pemerintahan di Indonesia yang diatur pada UUD 1945. Tujuan yang lainnya adalah untuk mencerdaskan mahasiswa agar menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban yang ia miliki. Pengenalan nilai-nilai dasar Pancasila dalam PPKn berguna untuk membentuk karakter dan moral mahasiswa sebagai penerus bangsa yang berintegritas, bermartabat, dan menghargai keberagaman sosial (Wayan dkk., 2024). Selain hal tersebut, kajian filosofis dalam PPKn juga bertujuan untuk memberikan kemampuan analitis, memperdalam pemahaman mahasiswa tentang filosofi dasar dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama bangsa Indonesia. Dengan demikian, PPKn di perguruan tinggi yang mana diharapkan dapat melahirkan generasi muda cerdas, berwawasan luas, dan berkarakter untuk dapat membangun bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik (Nasozaro, 2019).

Selain itu, pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di perguruan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang aktif dan terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui program ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami penyelenggaraan sistem politik dan proses pemerintahan Indonesia, serta berkontribusi dalam pembangunan dan perbaikan masyarakat secara keseluruhan. PPKn juga berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis di kalangan mahasiswa (Adnin dkk., 2023). Dengan mendalami nilai-nilai filosofis yang mendasari negara, maka mereka diharapkan mampu mengevaluasi dan mengidentifikasi berbagai masalah sosial yang perlu diatasi oleh negara dan juga masyarakat. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, pendekatan PPKn yang inovatif dan kreatif juga menjadi hal yang penting. Salah satu dari strategi yang diterapkan adalah dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengajaran PPKn, agar proses belajar menjadi menarik dan memberikan pengalaman yang interaktif serta berkesan bagi mahasiswa. Untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi masa depan yang semakin

kompleks, PPKn di perguruan tidak hanya menyiapkan pengetahuan dan wawasan. Program ini melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan dan inisiatif dari masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya membangun bangsa dan negara. Program ini memberikan pengaruh dalam membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila.

Pengantar pendidikan kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter mahasiswa. Pertama, PKn bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, serta memperdalam pengetahuan mereka tentang konstitusi dan sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945. Kedua, pendidikan ini yang memberikan wawasan mengenai nilai-nilai dasar Pancasila, yang menjadi landasan negara dan juga ideologi bangsa Indonesia. Selain itu, ketiga, PKn yang mendorong mahasiswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka dapat mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, ruang lingkup PKn ini juga mencakup pengembangan keterampilan analisis melalui kajian filosofis mengenai Pembukaan UUD 1945, yang mana memungkinkan mahasiswa untuk mengkritisi dan mengevaluasi dasar-dasar filosofis yang mendasari konstitusi Indonesia. Terakhir, PKn juga berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam literasi, berpikir kritis, mengemukakan argumen, dan menulis secara akademik. Dengan demikian, PKn tidak hanya menjadi materi ajar, tetapi juga sarana penting dalam membentuk generasi muda penerus yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Risky dkk., 2024).

Terdapat beberapa faktor yang mana dapat mendukung upaya peningkatan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, antara lain: Pertama, kebijakan pemerintah yang mendukung. Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan, pemerintah memiliki peran penting dengan menyediakan kebijakan-kebijakan yang dapat memperkuat strategi dan program pengajaran kewarganegaraan yang efektif. Kedua, pemanfaatan teknologi yang tepat. Teknologi yang dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih modern dan interaktif, seperti pembelajaran daring atau digital. Dengan memanfaatkan teknologi ini, maka mahasiswa akan mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, keberadaan pendidik dan staf pengajar yang lebih berkualitas. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kualitas dosen dan staf pengajar memegang peranan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraannya (Suyono dkk., 2024).

Untuk menerapkan model-model pengajaran praktik pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, terutama melalui kajian filosofis pembukaan UUD 1945 di abad 21, maka berikut adalah beberapa penugasan yang bisa diberikan kepada mahasiswa guna membangun pemikiran kritis dan cerdas serta kreatif:

a. Penelitian Tindakan Partisipatif

Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian yang melibatkan pengambilan data dan informasi lapangan terkait pembelajaran kewarganegaraan. Mereka akan menerapkan metode pengajaran praktik yang telah dipelajari sebelumnya.

b. Perencanaan Pengajaran Praktik

Mahasiswa yang bertugas merancang dan mengelola pengajaran praktik. Ini termasuk membuat jadwal, menyusun suatu materi, serta juga dalam melakukan persiapan dan pengaturan lainnya.

c. Kunjungan Lapangan

Melalui kunjungan ke berbagai organisasi masyarakat dan lokasi publik, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung yang merupakan bagian penting dari kegiatan secara praktik.

d. Penyusunan Laporan Kegiatan

Mahasiswa yang dapat menyusun laporan tentang kegiatan pengajaran praktik yang mencakup refleksi atas pengalaman, analisis hasil dan tujuan pembelajaran, serta memberikan komentar dan saran untuk perbaikan ke depannya yang nantinya menjadi sarana untuk referensi.

e. Penyelenggaraan Pertemuan dengan Pemangku Kepentingan

Mahasiswa dapat mengorganisir pertemuan dengan pemangku kepentingan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi sosial, dan pihak eksternal, untuk mendapatkan masukan dan umpan balik mengenai proses pengajaran, perkembangan kurikulum, dan evaluasi keberhasilan.

Penugasan ini ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki latar belakang dalam pendidikan kewarganegaraan atau yang terlibat dalam program praktik. Melalui berbagai tugas ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman nyata dalam pengajaran secara praktik, serta mempersiapkan diri untuk menjadi warga negara yang lebih baik lagi dan bertanggung jawab di masa mendatang.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai makna dan nilai-nilai kewarganegaraan, terutama dalam konteks Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis. Melalui kajian filosofis terhadap pembukaan UUD 1945 dalam konteks Indonesia di abad 21, mahasiswa diharapkan dapat memahami dengan lebih mendalam berbagai nilai fundamental seperti demokrasi, hak asasi manusia, keragaman budaya, dan persatuan bangsa, yang menjadi fondasi negara ini. Dalam dunia yang terus berubah, penting bagi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi untuk mencakup juga perspektif global. Mahasiswa perlu disadarkan akan cara-cara Indonesia berinteraksi dengan negara lain serta dampak dari globalisasi, sekaligus bagaimana menjaga identitas dan nilai kebangsaannya. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus menekankan pentingnya kerja sama internasional dan tanggung jawab sebagai warga negara di tingkat global. Implementasi pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan efektif, dengan cara menciptakan atmosfer pendidikan yang inklusif serta mendorong keaktifan mahasiswa dalam kegiatan sosial dan politik. Perguruan tinggi ini juga dapat menyelenggarakan program-program seperti seminar, diskusi, dan aktivitas sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang isu-isu kewarganegaraan yang krusial bagi pembangunan bangsa. Namun, masih ada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang masih belum dalam memprioritaskan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin perguruan tinggi dan pengambil kebijakan pendidikan untuk menyadari urgensi pendidikan kewarganegaraan ini, serta berkomitmen pada pembentukan warga negara yang lebih aktif dan bertanggung jawab di dalam masyarakat secara luas. Berbagai aspek diperlukan guna mewujudkan pendidikan kewarganegaraan yang dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi juga harus meliputi aspek praktis seperti mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan sosial dan politik, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang esensial untuk menjadi warga negara yang berpengaruh dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan harus diutamakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan diimplementasikan secara efisien agar tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Melalui langkah-langkah ini, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi instrumen efektif untuk mencetak generasi muda yang

bertanggung jawab, kritis, dan siap menghadapi tantangan secara global maupun yang secara lokal.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adnin, I., Sapriya, S., Nuriyani, R., Ramadhan, A. R., Damayanti, S., & Putra, A. N. (2023). Analisis Implikasi Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Pembelajaran PKn. *Educatio*, 18(2), 304–314. <https://doi.org/10.29408/EDC.V18I2.24310>
- Azzahra, A. H., Nawry, N., & Nelwati, ; Sasmi. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 23–31. <https://doi.org/10.58192/SIDU.V3I2.2287>
- Khatimah, K., Alhamdani, Selvia, V., Sugiyarti, A., Maulana, M. G., & Putra, M. L. S. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik dan Demokrasi di Indonesia. *VOX POPULI*, 7(2), 128–143. <https://doi.org/10.24252/VP.V7I2.52688>
- Nasozaro, H. O. (2019). PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Warta Dharmawangsa*, 13(4). <https://doi.org/10.46576/WDW.V0I62.504>
- Pahlevi, F. S. (2016). REVITALISASI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA. *Justicia Islamica*, 13(2), 173–198. <https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V13I2.585>
- Prasetyo, D., Danurahman, J., Hermawan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, H., & Dahlan, A. (2023). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA BAIK DAN CERDAS. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 8(1), 15–23. <https://doi.org/10.15294/HARMONY.V8I1.52768>
- Redhana, I. W. (2019). MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN ABAD KE-21 DALAM PEMBELAJARAN KIMIA. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, 13(1). <https://doi.org/10.15294/JIPK.V13I1.17824>
- Risky, E. A., Widyatama, P. R., Syaifudin, M., Mustika, M., Sari, K., Profesi, P., & Ppkn, G. (2024). Pemanfaatan Platform Wordwall sebagai Sarana Pembelajaran dalam Mendorong Motivasi Belajar Pendidikan Pancasila Kelas IX SMPN 16 Surabaya. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1429–1439–1429 – 1439. <https://doi.org/10.31004/IRJE.V4I4.1121>
- Rudy Widyatama, P., Uyun, Q., Amalia Risky, E., Karmenita Ngene, P., Wahyu Dinda Lestari, A., Nurul Jannah, A., Syaifudin, M., Mustika Kartika Sari, M., Profesi Guru PPKn, P., Kata Kunci, A., & Jannah, N. (2024). Upaya meningkatkan Minat Belajar Pendidikan Pancasila melalui Model Problem Based Learning (PBL) pada Siswa Kelas VIII SMPN 16 Surabaya. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1305–1322. <https://doi.org/10.31004/IRJE.V4I3.1023>

- Samidi, R., Kusuma, W. J., Artikel, I., Juni, D., Juni, D., & Juni, D. (2020). ANALISIS KRITIS EKSISTENSI NILAI PATRIOTISME DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 5(1), 30–39. <https://doi.org/10.15294/HARMONY.V5I1.40284>
- Setiasih, A. P., Sari, K. W., Rahmat, R. N., & Untari, S. (2024). THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENT TOWARDS EDUCATION IN THE 3T REGION AT JUNIOR HIGH SCHOOL LEVEL IN THE KALI PARE AREA, MALANG DISTRICT. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 6(3). <https://journalpedia.com/1/index.php/jpi/article/view/1850>
- Suyono, S., Suhari, S., Budi Lestari, B., Askinah, K., Aulia Salma, J., Almaratus Azahra, H., PPKn, P., Ilmu Sosial dan Humaniora, F., PGRI Adi Buana Surabaya Jl Dukuh Menanggal XII, U., Menanggal, D., & Gayungan, K. (2024). Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah PPKn Dalam Menkuatkan Kualitas Menulis Guru PPKn SMA Kota Surabaya. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2(1), 161–170. <https://doi.org/10.61132/ASPIRASI.V2I1.266>
- Wayan, S. I., Pandu, A., Widyatama, R., Fauzi, A., Kurikulum, K. K., & Pancasila, P. (2024). Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila SMA Negeri 17 Surabaya. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.32884/IDEAS.V10I1.1634>
- Widyatama, P. R., Trianus, J., & Utami, S. (2024). Diffusion of Innovation: Application of Interactive Learning Media in PPKn Subjects in Junior High School. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(1), 46–57. <https://doi.org/10.26618/JED.V9I1.13104>
- Wulandari, F., Taufiq, M., & Tanjung, H. (2022). PENERAPAN PRAKTIK KEWARGANEGARAAN UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS MAHASISWA. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 2580–0086. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/civicedu/article/view/7092>
- Zufar, Z., Thaariq, A., & Karima, U. (2023). Menelisik Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Konteks Pembelajaran Abad 21: Sebuah Renungan dan Inspirasi. *FOUNDASIA*, 14(2), 20–36. <https://doi.org/10.21831/FOUNDASIA.V14I2.63740>